

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah ditetapkan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pada UU No. 17 Tahun 2003 tersebut khususnya pada pasal 31, disebutkan bahwa Gubernur/Bupati/Wali Kota menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan.

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun secara sistematis mengenai posisi keuangan entitas pada saat tertentu, dan kinerja suatu entitas pada periode tertentu. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkualitas tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan yang dapat mengatur dan mengelola penyajian laporan keuangan. Peraturan itu yaitu Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Tujuannya adalah sebagai acuan bagi penyusun standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam melaksanakan tugasnya, penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar, pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (Hartina, 2009:3).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintah diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa SAP diperlukan untuk menyusun laporan pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk merencanakan biaya-biaya yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan, serta memprediksi kondisi ekonomi setelah kegiatan pemerintahan dilaksanakan. Agar kegiatan pemerintahan berjalan dengan baik maka dibutuhkan informasi keuangan yang sesuai dengan keuangan daerah.

Penggunaan informasi laporan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilaporkan dan dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Penggunaan informasi laporan keuangan daerah berkaitan dengan penilaian para pengguna laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas dan transparansi setiap laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah.

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002).

Para pengguna laporan keuangan baik pihak eksternal maupun internal diharapkan untuk paham dan mengerti informasi yang disajikan dalam laporan

keuangan agar lebih mudah dalam menerjemahkan apa yang terkandung dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Pemakai laporan keuangan yang paham informasi yang disajikan dalam laporan keuangan akan lebih mudah untuk menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan maupun untuk melakukan analisis-analisis yang berhubungan dengan kinerja pemerintah daerah, apabila pengguna informasi laporan keuangan daerah tidak paham tentang laporan keuangan daerah, maka pengguna cenderung tidak akan menggunakan informasi keuangan daerah dengan maksimal.

Penyajian laporan keuangan daerah merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Penyajian laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting, menurut Diamond (2003), pengungkapan atas informasi ini merupakan suatu elemen dasar dari transparansi fiskal dan akuntabilitas. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, laporan keuangan pemerintah pokok setidaknya terdiri atas : (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), (b) Neraca, (c) Laporan Arus Kas (LAK), (d) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengertian dari aksesibilitas dalam laporan keuangan sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006).

Adanya aksesibilitas maka diharapkan penyajian Laporan Keuangan Daerah dapat berpengaruh positif terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah merupakan sarana penunjang dalam rangka

perwujudan lembaga pemerintah daerah sebagai lembaga sektor publik. Aksesibilitas juga berpengaruh terhadap seberapa besar penggunaan informasi keuangan daerah. Hasil penelitian Mulyana (2006) menyatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi dan aksesibilitas laporan keuangan daerah.

Untuk melakukan pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik diperlukan informasi akuntansi yang salah satunya berupa laporan keuangan. Untuk dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah dibutuhkan pula kompetensi sumber daya manusia. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sutrisno (2009) yaitu kompetensi dalam organisasi publik maupun privat sangat diperlukan terutama untuk menjawab tuntutan organisasi, di mana adanya perubahan yang sangat cepat, perkembangan masalah yang sangat kompleks dan dinamis serta ketidak pastian masa depan dalam tantangan kehidupan masyarakat.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan daerah secara andal, mengamankan aset Negara, dan mendorong ketaatan terhadap perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai sistem dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas ,dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Maka dari itu diperlukan posisi pengelola keuangan yang berkompoten dibidang keuangan. Informasi yang bermanfaat bagi para pemakai informasi yang

mempunyai nilai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Safitri Ratna Amelia (2009) tentang pengaruh Penyajian laporan keuangan dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan daerah pada studi empiris di Kabupaten Kampar, bahwa memiliki pengaruh yang positif.

Sebagai salah satu pertanggung jawaban dalam penyelenggaraan yang diatur dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara dan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, supaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah adalah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Karena ingin menguji apakah SKPD Pekanbaru penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **”PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENGGUNAAN INFORMASI KEUANGAN DAERAH (SKPD DI KOTA PEKANBARU)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah?
2. Bagaimana pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan daerah?
3. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah?

#### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi keuangan.
2. Pengaruh Aksesibilitas Keuangan Daerah terhadap Penggunaan Informasi Keuangan.

3. Pengaruh penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah.

## 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Bagi Akademis

Diharapkan dapat menambah wawasan pemikiran dalam hal akuntansi khususnya pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan

- b. Bagi Organisasi Publik atau SKPD Pekanbaru

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan dan pemahaman serta bahan pertimbangan berkaitan dengan Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah (Pada SKPD Pekanbaru) dalam menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian dibidang akuntansi sektor publik dimasa yang akan datang.

- c. Bagi Pemerintahan Daerah

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi pemerintah, khususnya dalam hal kinerja pemerintah daerah agar dapat ditingkatkan lagi.

#### **D. Sistematika Penulisan**

BAB I : Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Dalam bab ini merupakan landasan teori-teori yang terdiri dari pengertian pengetahuan penyajian laporan keuangan daerah dan akseibilitas keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

BAB III : Dalam bab ini dijelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel dalam penelitian. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis yang digunakan dalam penelitian

BAB IV : Dalam bab ini akan membahas tentang gambaran umum pada Pemerintah Pekanbaru mengenai pengetahuan penyajian laporan keuangan daerah dan akseibilitas keuangan daerah terhadap penggunaan informasi keuangan daerah.

BAB V : Dalam bab ini akan dibahas hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas keuangan terhadap penggunaan informasi keuangan daerah

BAB VI : Penutup, yang merupakan kesimpulan dan saran